

EKONOMI UNTUK KEMANUSIAAN

MENCARI KESEIMBANGAN ANTARA
PERTUMBUHAN DAN KEADILAN GLOBAL?



Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Ekonomi untuk Kemanusiaan: Mencari
Keseimbangan antara Pertumbuhan dan Keadilan Global*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudymt75@gmail.com

12 April 2026

EKONOMI UNTUK KEMANUSIAAN: MENCARI KESEIMBANGAN ANTARA PERTUMBUHAN DAN KEADILAN GLOBAL

Abstrak

Makalah ini membahas perlunya menata ulang orientasi ekonomi global agar pertumbuhan tidak diperlakukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk memperluas martabat, kebebasan, keamanan sosial, dan kemakmuran manusia. Tesis utama tulisan ini adalah bahwa dunia sedang menghadapi paradoks besar: kemampuan produksi, inovasi, dan kekayaan global terus meningkat, tetapi kemiskinan, kerentanan sosial, ketimpangan pendapatan dan kekayaan, krisis kerja layak, tekanan utang, dan kerentanan iklim masih membatasi kehidupan miliaran orang. Di satu sisi, pertumbuhan tetap penting karena tanpa pertumbuhan ruang fiskal, investasi, dan penciptaan kerja akan melemah. Di sisi lain, pertumbuhan yang tidak inklusif, tidak berkeadilan, dan tidak berkelanjutan justru memperdalam fragmentasi sosial dan merusak fondasi kemanusiaan itu sendiri. IMF memproyeksikan pertumbuhan global melambat, UNDP melaporkan kemajuan pembangunan manusia melambat ke tingkat terendah dalam 35 tahun, World Bank menilai kemajuan shared prosperity tertahan, ILO menunjukkan jutaan orang masih terperangkap dalam jobs gap dan defisit kerja layak, sementara FAO dan UN menegaskan bahwa pangan, perlindungan sosial, dan pembiayaan pembangunan masih jauh dari memadai. Dalam konteks tersebut, makalah ini berargumen bahwa ekonomi untuk kemanusiaan menuntut keseimbangan baru antara efisiensi

dan pemerataan, pasar dan negara, inovasi dan perlindungan sosial, pertumbuhan dan keberlanjutan, serta kepentingan nasional dan solidaritas global. Jalan ke depan bukan anti-pertumbuhan, melainkan pro-pertumbuhan yang inklusif, pro-keadilan, dan pro-masa depan manusia.

(IMF)

Kata kunci: ekonomi untuk kemanusiaan, pertumbuhan ekonomi, keadilan global, kemiskinan, ketimpangan, pembangunan manusia, pekerjaan layak, perlindungan sosial, keberlanjutan.

Ekonomi untuk Kemanusiaan: Mencari Keseimbangan antara Pertumbuhan dan Keadilan Global

1. Pendahuluan

Pertanyaan paling mendasar dalam ilmu ekonomi sesungguhnya bukanlah seberapa besar suatu bangsa dapat memproduksi barang dan jasa, melainkan untuk siapa produksi itu dijalankan, siapa yang memperoleh manfaatnya, dan apakah hasil akhirnya sungguh memperkaya kehidupan manusia. Selama beberapa dekade, dunia modern sering memuja pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Produk domestik bruto, pertumbuhan perdagangan, kenaikan investasi, dan ekspansi industri dijadikan tolok ukur dominan dalam menilai kemajuan. Namun pengalaman global menunjukkan bahwa pertumbuhan, meskipun penting, tidak identik dengan keadilan. Banyak negara bertumbuh tanpa mampu menghapus kemiskinan secara mendalam, memperkuat kelas menengah secara luas, atau menjamin kerja layak dan perlindungan sosial bagi warganya. Bahkan dalam skala global, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berdampingan dengan konsentrasi

kekayaan, kemerosotan lingkungan, dan eksklusi sosial yang luas. ([World Bank](#))

Kondisi mutakhir dunia memperlihatkan paradoks itu dengan sangat jelas. IMF memproyeksikan pertumbuhan global melambat dari 3,3 persen pada 2024 menjadi 3,2 persen pada 2025 dan 3,1 persen pada 2026, dengan risiko tetap condong ke bawah akibat proteksionisme, fragmentasi, ketidakpastian berkepanjangan, dan kerentanan fiskal. Pada saat yang sama, UNDP melaporkan bahwa peningkatan global Human Development Index yang diproyeksikan untuk 2024—di luar tahun-tahun krisis 2020–2021—merupakan kenaikan paling kecil sejak indeks itu diperkenalkan pada 1990, dan kesenjangan antara negara ber-HDI rendah dan sangat tinggi terus melebar untuk tahun keempat berturut-turut. Ini berarti bahwa dunia bukan hanya bertumbuh lebih lambat, tetapi juga berkembang secara lebih timpang dan lebih rapuh. ([IMF](#))

Dalam kerangka tersebut, gagasan “ekonomi untuk kemanusiaan” menjadi sangat relevan. Gagasan ini menolak dua penyederhanaan. Pertama, ia menolak pandangan bahwa pertumbuhan otomatis menetes ke bawah dan dengan sendirinya menghasilkan keadilan. Kedua, ia juga menolak romantisme yang mengabaikan pentingnya pertumbuhan sebagai basis material untuk memperluas kesempatan hidup. Ekonomi untuk kemanusiaan justru berangkat dari pertanyaan etis dan institusional: bagaimana pertumbuhan dapat diubah menjadi kapabilitas, rasa aman, kebebasan substantif, akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup yang layak, dan partisipasi sosial-politik yang bermakna? Di sini ekonomi tidak diperlakukan sebagai mesin akumulasi semata, tetapi sebagai arsitektur institusi untuk memungkinkan manusia hidup secara bermartabat.

Makalah ini berupaya menjawab pertanyaan itu melalui enam langkah. Pertama, menjelaskan kerangka normatif ekonomi untuk kemanusiaan. Kedua, menelaah mengapa pertumbuhan tetap penting tetapi tidak

memadai. Ketiga, memetakan wajah ketidakadilan global mutakhir. Keempat, menjelaskan mengapa ketimpangan dan eksklusi merusak baik efisiensi ekonomi maupun solidaritas kemanusiaan. Kelima, menawarkan agenda keseimbangan baru antara pertumbuhan dan keadilan global. Keenam, menarik implikasi bagi arah kebijakan pembangunan dunia ke depan. Dengan demikian, makalah ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga argumentatif: dunia memerlukan ekonomi yang tetap produktif, namun lebih manusiawi, lebih distributif, dan lebih bertanggung jawab terhadap masa depan bersama.

2. Kerangka Konseptual: Apa yang Dimaksud dengan Ekonomi untuk Kemanusiaan?

Secara konseptual, ekonomi untuk kemanusiaan adalah cara pandang yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sekadar input produksi. Dalam perspektif ini, perekonomian dinilai baik bukan semata-mata karena efisien, tetapi karena mampu memperluas kebebasan nyata manusia untuk hidup sehat, belajar, bekerja secara layak, berpartisipasi dalam masyarakat, dan membangun masa depan yang aman. Cara pandang ini sejalan dengan tradisi human development, capability approach, welfare economics yang diperbarui, serta kritik terhadap reduksi kesejahteraan menjadi angka agregat tunggal. Arah pikirnya sederhana tetapi sangat penting: ekonomi harus tunduk pada tujuan etis mengenai kehidupan manusia yang bernilai.

Di sinilah letak perbedaan antara "kekayaan" dan "kemakmuran manusia." Kekayaan menunjuk pada akumulasi sumber daya, aset, atau pendapatan. Kemakmuran manusia menunjuk pada mutu hidup yang dapat diwujudkan melalui sumber daya tersebut. Negara bisa kaya tetapi masyarakatnya rapuh; perusahaan bisa sangat untung tetapi pekerjanya tidak aman; dunia bisa semakin produktif tetapi tetap gagal melindungi yang paling rentan. World Bank sendiri menekankan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan saja bukan penanda pembangunan yang memadai; karena itu

lembaga tersebut menilai shared prosperity dan memperkenalkan Global Prosperity Gap untuk melihat seberapa jauh pendapatan masyarakat, terutama kelompok termiskin, dari ambang kemakmuran yang layak. Dengan kata lain, ukuran yang makin manusiawi bukan lagi sekadar “berapa besar kue ekonomi,” tetapi juga “siapa yang menikmati kue itu” dan “apakah kue itu cukup untuk menopang kehidupan yang bermartabat.” ([World Bank](#))

Kerangka ini juga mensyaratkan pembacaan baru terhadap relasi antara pasar, negara, dan masyarakat. Pasar penting karena ia mendorong efisiensi, inovasi, dan koordinasi ekonomi. Negara penting karena ia menetapkan aturan, menyediakan barang publik, membiayai perlindungan sosial, dan memperbaiki kegagalan pasar. Masyarakat sipil penting karena ia membawa koreksi moral, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketika salah satu unsur terlalu dominan, keseimbangan kemanusiaan mudah terganggu. Pasar tanpa regulasi cenderung menghasilkan konsentrasi, eksploitasi, atau eksklusivitas. Negara tanpa disiplin dan akuntabilitas dapat jatuh ke pemborosan, rente, atau otoritarianisme. Karena itu ekonomi untuk kemanusiaan pada dasarnya adalah proyek institusional: menata insentif, kekuasaan, dan distribusi agar efisiensi ekonomi tidak bertentangan dengan keadilan sosial.

Selain itu, ekonomi untuk kemanusiaan harus memperhitungkan batas-batas ekologis. Dalam dunia yang ditandai krisis iklim, degradasi ekosistem, dan bencana yang kian sering, pertumbuhan yang menghancurkan basis kehidupan tidak dapat lagi disebut kemajuan. World Bank memperingatkan bahwa satu dari lima orang di dunia berisiko mengalami peristiwa cuaca ekstrem sepanjang hidupnya, dan bahwa perubahan iklim merupakan risiko mendasar bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Sementara itu, laporan ketimpangan global menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi erat terhubung dengan ketimpangan ekologis: 10 persen pengemisi teratas bertanggung jawab atas hampir separuh emisi global, sedangkan 50 persen terbawah hanya menghasilkan 12 persen. Ini

menunjukkan bahwa keadilan sosial dan keadilan ekologis tidak dapat dipisahkan. ([World Bank](#))

3. Mengapa Pertumbuhan Tetap Penting?

Meskipun makalah ini kritis terhadap reduksi pembangunan menjadi pertumbuhan, hal itu tidak berarti pertumbuhan kehilangan arti.

Pertumbuhan tetap penting karena tanpa pertumbuhan, masyarakat akan kesulitan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, memperluas basis pajak, dan mendanai investasi publik. Dalam banyak negara berkembang, pertumbuhan tetap menjadi syarat material untuk mengurangi kemiskinan massal dan memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial.

Pertumbuhan juga penting untuk memberi ruang fiskal bagi negara, terutama ketika beban utang, tuntutan transisi energi, dan kebutuhan demografis meningkat secara bersamaan. Oleh sebab itu, perdebatan yang sehat bukan antara pertumbuhan versus keadilan, tetapi mengenai bentuk pertumbuhan seperti apa yang patut diupayakan. ([IMF](#))

Kebutuhan akan pertumbuhan terlihat jelas dari tantangan ketenagakerjaan global. World Bank memperkirakan bahwa antara 2025 dan 2035 sekitar 1,2 miliar anak muda akan memasuki usia kerja di negara-negara berkembang. Tantangan ini sangat besar: bila ekonomi dunia gagal menciptakan pekerjaan produktif dalam skala besar, maka pertumbuhan penduduk usia kerja dapat berubah dari bonus demografi menjadi sumber frustrasi sosial. ILO juga memproyeksikan bahwa pada 2026 pengangguran global mencapai 186 juta orang dan jobs gap—ukuran yang lebih luas dari sekadar pengangguran terbuka—mencapai 408 juta orang. Angka-angka ini menunjukkan bahwa dunia masih membutuhkan ekspansi ekonomi yang kuat agar penyerapan tenaga kerja dan produktivitas tidak mandek. ([WBG Institute](#))

Pertumbuhan juga berperan dalam mengurangi kemiskinan, walaupun efeknya sangat bergantung pada distribusinya. Dalam laporan World Bank

tentang poverty, prosperity, and planet, ditegaskan bahwa jika pertumbuhan tidak dipercepat dan tidak menjadi lebih inklusif, penghapusan kemiskinan ekstrem akan membutuhkan waktu beberapa dekade, dan perlu lebih dari satu abad untuk mengangkat masyarakat di atas garis US\$6,85 per hari. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan memang diperlukan, tetapi kualitas pertumbuhan menentukan kecepatannya mengubah hidup manusia. Pertumbuhan yang terkonsentrasi di kelompok atas atau di sektor yang miskin penyerapan kerja akan memberi hasil jauh lebih kecil terhadap pengurangan kemiskinan dibanding pertumbuhan yang mendorong pekerjaan lebih baik, pendidikan, infrastruktur, dan layanan dasar. ([World Bank](#))

Ada alasan lain mengapa pertumbuhan tetap penting, yakni untuk menstabilkan masyarakat. Kemandekan ekonomi cenderung mendorong polarisasi, xenofobia, populisme, dan konflik distribusi. UN World Social Report 2025 menegaskan bahwa insecurity ekonomi, tingkat ketimpangan yang mencolok, menurunnya kepercayaan sosial, dan fragmentasi sosial sedang mendestabilisasi banyak masyarakat. Ketika ekonomi tidak memberi harapan mobilitas, rasa ketidakadilan meningkat. Jadi, pertumbuhan yang cukup kuat masih merupakan salah satu syarat bagi kohesi sosial. Namun, syarat itu bukanlah syarat yang cukup. Pertumbuhan yang hanya meningkatkan kekayaan segelintir orang justru dapat memperburuk fragmentasi. ([UN DESA](#))

4. Mengapa Pertumbuhan Saja Tidak Cukup?

Di sinilah tesis utama makalah ini mulai mengeras: pertumbuhan itu penting, tetapi pertumbuhan saja tidak cukup. Pertama, karena pertumbuhan agregat bisa menutupi ketimpangan distribusi. Sebuah ekonomi bisa bertumbuh cepat, tetapi jika mayoritas manfaatnya dinikmati oleh kelompok terkaya, maka kualitas pembangunan tetap rendah. Laporan World Inequality menunjukkan bahwa antara 1995 dan 2021, 1 persen teratas menangkap 38 persen pertumbuhan kekayaan global,

sedangkan 50 persen terbawah hanya menangkap 2,3 persen. Angka ini menegaskan bahwa pertumbuhan kekayaan global tidak secara otomatis berarti demokratisasi kesejahteraan. Ia bisa justru memperkuat konsentrasi aset, peluang, dan kekuasaan.

Kedua, pertumbuhan bisa terjadi tanpa pekerjaan yang layak. ILO menunjukkan bahwa walaupun pengangguran global relatif stabil, kualitas pekerjaan masih menjadi masalah serius. Pada 2025, tingkat pengangguran pemuda global naik menjadi 12,4 persen, sementara 257 juta anak muda berstatus not in employment, education, or training. Selain itu, pertumbuhan pendapatan tenaga kerja global masih belum cukup untuk memulihkan kerugian riil akibat lonjakan inflasi 2022–2024, dan pangsa pendapatan tenaga kerja global pada 2025 masih berada di bawah level 2019. Artinya, sekalipun ekonomi tetap tumbuh, pekerja belum tentu menikmati bagian yang adil dari hasil produktivitas. ([Research Repository](#))

Ketiga, pertumbuhan bisa terjadi bersamaan dengan stagnasi pembangunan manusia. UNDP menegaskan bahwa peningkatan global HDI yang diproyeksikan untuk 2024 adalah yang paling kecil sejak 1990, dan bila perlambatan ini menjadi normal baru, pencapaian dunia dengan very high HDI dapat mundur hingga beberapa dekade. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan bukan satu-satunya penentu kemajuan. Bila pendidikan, kesehatan, dan kesempatan sosial tidak bergerak cukup cepat, maka kenaikan output ekonomi tidak akan otomatis diterjemahkan menjadi kemajuan manusia.

Keempat, pertumbuhan bisa tidak tahan guncangan bila tidak disertai perlindungan sosial dan institusi yang kuat. Data SDG 2025 menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya lebih dari separuh penduduk dunia menerima setidaknya satu manfaat perlindungan sosial, tetapi 3,8 miliar orang masih tidak terlindungi. Cakupan di negara berpendapatan rendah hanya 9,7 persen, dan untuk membiayai basic social security floors di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah diperlukan

tambahan sekitar US\$1,4 triliun per tahun. Dalam situasi seperti ini, guncangan ekonomi, pandemi, bencana iklim, atau konflik dapat segera menghapus kemajuan yang telah dibangun. Pertumbuhan tanpa jaring pengaman membuat masyarakat sangat rentan. ([UNSD](#))

Kelima, pertumbuhan bisa menggerus dasar ekologis kehidupan. World Bank dan UNDP sama-sama mengingatkan bahwa iklim semakin menekan prospek pembangunan. Dalam MPI 2025, dari 1,1 miliar orang yang hidup dalam kemiskinan multidimensi, 887 juta tinggal di wilayah yang terpapar sedikitnya satu dari empat bahaya iklim: panas tinggi, kekeringan, banjir, atau polusi udara. Maka, pertumbuhan yang tidak memperhitungkan resiliensi iklim akan menciptakan ekonomi yang tampak besar di atas kertas tetapi rapuh dalam kenyataan sosial-ekologis. ([Human Development Reports](#))

5. Wajah Ketidakadilan Global Kontemporer

5.1 Kemiskinan yang Berubah Bentuk, tetapi Belum Pergi

Salah satu ironi zaman ini adalah bahwa dunia telah menjadi sangat kaya, tetapi kemiskinan ekstrem masih bertahan dalam skala yang besar. SDG Report 2025, yang sudah memakai pembaruan garis kemiskinan internasional World Bank dari US\$2,15 ke US\$3,00 per hari pada PPP 2021, memperkirakan bahwa pada 2025 ada 808 juta orang atau 9,9 persen populasi dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Lebih dari tiga perempat dari mereka berada di Sub-Sahara Afrika atau di negara-negara rapuh dan terdampak konflik. Proyeksi itu menunjukkan bahwa target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2030 makin tidak realistis tanpa percepatan besar. ([UNSD](#))

Di sisi lain, bila menggunakan ambang kemakmuran yang lebih tinggi, gambarnya bahkan lebih berat. World Bank memperkirakan 622 juta orang masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2030 pada lintasan saat ini, dan sekitar 3,4 miliar orang—hampir 40 persen populasi dunia—

kemungkinan hidup dengan kurang dari US\$6,85 per hari. Pesan utamanya jelas: walaupun sebagian orang akan terangkat keluar dari kemiskinan ekstrem, dunia masih sangat jauh dari kemakmuran yang inklusif. Banyak orang mungkin tidak lagi tergolong "sangat miskin," tetapi tetap hidup dalam kerentanan permanen, jauh dari keamanan ekonomi yang layak. ([World Bank](#))

Yang lebih penting lagi, kemiskinan sekarang tidak bisa dipahami secara sempit sebagai kekurangan pendapatan. MPI 2025 menunjukkan bahwa 1,1 miliar orang di 109 negara hidup dalam kemiskinan multidimensi; hampir dua pertiga dari mereka tinggal di negara berpendapatan menengah, dan lebih dari separuhnya adalah anak-anak. Deprivasi yang umum meliputi kekurangan bahan bakar bersih untuk memasak, perumahan, sanitasi, nutrisi, dan listrik. Temuan ini penting karena menegaskan bahwa pembangunan yang bermakna tidak hanya tentang transfer uang, tetapi juga tentang infrastruktur dasar kehidupan manusia. ([Human Development Reports](#))

5.2 Ketimpangan Pendapatan, Kekayaan, dan Emisi

Jika kemiskinan menunjukkan seberapa banyak orang hidup di bawah standar minimum, ketimpangan menunjukkan bagaimana hasil pembangunan dibagi. World Bank mencatat bahwa satu perlima penduduk dunia hidup di negara dengan ketimpangan tinggi, dan ketimpangan tersebut mempersempit mobilitas sosial dan menghambat pertumbuhan yang inklusif. Bahkan untuk menutup prosperity gap pada laju pertumbuhan sekarang, negara upper-middle income yang tipikal memerlukan waktu 100 tahun. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukan sekadar isu moral, tetapi hambatan pembangunan yang nyata. ([World Bank](#))

Laporan ketimpangan global memberi ilustrasi yang lebih tajam. Antara 1995 dan 2021, 1 persen teratas menangkap 38 persen pertumbuhan kekayaan global, sedangkan 50 persen terbawah hanya menangkap 2,3

persen. Selain itu, setengah terbawah di banyak wilayah dunia memiliki porsi kekayaan yang sangat kecil. Ketika konsentrasi aset demikian tinggi, ketimpangan tidak hanya terjadi pada konsumsi, tetapi juga pada akses ke pendidikan terbaik, kesehatan, politik, teknologi, dan waktu depan itu sendiri. Mereka yang berada di puncak bukan hanya menikmati pendapatan lebih besar, tetapi juga memiliki kapasitas lebih besar untuk memengaruhi aturan main.

Ketimpangan itu juga bersifat ekologis. Laporan yang sama menunjukkan bahwa 10 persen pengemisi teratas bertanggung jawab atas hampir 50 persen emisi global, sementara 50 persen terbawah hanya menghasilkan 12 persen. Dengan kata lain, mereka yang paling sedikit berkontribusi pada krisis iklim sering kali justru yang paling rentan menanggung dampaknya. Ini adalah inti dari ketidakadilan global kontemporer: kerentanan tidak terbagi secara sebanding dengan tanggung jawab.

5.3 Pekerjaan Ada, tetapi Kerja Layak Masih Kurang

Dunia modern juga menghadapi persoalan klasik yang muncul dalam bentuk baru: tidak semua pekerjaan adalah jalan keluar dari kemiskinan. SDG 2025 menunjukkan bahwa pada 2024 masih ada lebih dari 240 juta pekerja dunia yang hidup dengan kurang dari US\$2,15 per hari pada PPP 2017. Di negara kurang berkembang, hampir 3 dari 10 pekerja tetap hidup dalam kemiskinan ekstrem. Ini berarti pekerjaan saja belum cukup; yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang produktif, berupah layak, dan terlindungi. ([UNSD](#))

ILO menambahkan bahwa pada 2026 jobs gap global diproyeksikan 408 juta, dan pada 2025 tingkat pengangguran kaum muda mencapai 12,4 persen dengan 257 juta anak muda berstatus NEET. Kondisi pemuda ini sangat penting dalam perspektif kemanusiaan karena masa muda adalah periode pembentukan kapabilitas. Bila jutaan orang kehilangan kesempatan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja di awal hidupnya, maka kerugian sosialnya akan menumpuk lintas dekade. Lebih

jauh lagi, ILO menekankan bahwa pertumbuhan upah riil global dan pendapatan tenaga kerja masih belum cukup untuk menutup kehilangan riil akibat inflasi beberapa tahun terakhir. ([Research Repository](#))

Kerja layak juga berkaitan dengan perubahan struktural ekonomi dunia. ILO mengingatkan bahwa sekitar 465 juta pekerjaan di 80 negara pada 2024 bergantung pada permintaan luar negeri melalui ekspor barang dan jasa serta rantai pasok terkait. Artinya, fragmentasi perdagangan, ketidakpastian kebijakan, dan guncangan geopolitik tidak hanya memengaruhi statistik makro, tetapi juga mata pencaharian nyata jutaan rumah tangga. Dalam konteks seperti ini, ekonomi untuk kemanusiaan harus menilai perdagangan dan industrialisasi bukan hanya dari nilai ekspornya, tetapi dari kualitas pekerjaan yang dihasilkannya. ([Research Repository](#))

5.4 Pangan, Gizi, dan Biaya Hidup

Dimensi kemanusiaan yang paling konkret adalah kemampuan orang untuk makan sehat. FAO melaporkan bahwa sekitar 673 juta orang mengalami kelaparan pada 2024. Di saat yang sama, SOFI 2025 menegaskan bahwa inflasi harga pangan yang tinggi pada banyak negara telah menggerus daya beli dan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah, mengurangi akses pada diet sehat. Rata-rata biaya diet sehat global juga terus terdorong naik menjadi sekitar 4,46 dolar PPP per orang per hari. Bagi kelas menengah di banyak negara kaya, angka ini mungkin terdengar biasa. Bagi keluarga miskin di negara berkembang, angka itu bisa berarti perbedaan antara makan bergizi dan sekadar bertahan hidup. ([FAOHome](#))

Persoalan pangan ini mengingatkan bahwa pertumbuhan tidak otomatis menjamin affordability. Harga bisa naik lebih cepat daripada pendapatan. Produktivitas pertanian bisa tumbuh, tetapi distribusi dan akses tetap timpang. Dari sudut ekonomi untuk kemanusiaan, sistem pangan yang adil bukan hanya yang mampu menghasilkan banyak kalori, tetapi yang

memungkinkan keluarga miskin memperoleh makanan sehat tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar lain seperti pendidikan atau kesehatan.

5.5 Utang, Pembiayaan, dan Ketidakadilan Struktural

Ketidakadilan global juga hidup dalam arsitektur keuangan internasional. World Bank mencatat bahwa antara 2022 dan 2024 negara-negara berkembang membayar US\$741 miliar lebih banyak dalam pokok dan bunga utang eksternal dibanding yang mereka terima dalam pembiayaan baru—selisih terbesar dalam sedikitnya 50 tahun. Pada 2024 mereka juga membayar bunga saja sebesar US\$415 miliar, dana yang sesungguhnya dapat dipakai untuk sekolah, kesehatan dasar, atau infrastruktur penting. Ini bukan sekadar masalah akuntansi; ini adalah persoalan moral dan institusional tentang bagaimana beban pembangunan dibagi. ([World Bank](#))

Pada saat yang sama, Kantor PBB untuk Pembiayaan Pembangunan menegaskan adanya kesenjangan pembiayaan SDGs sekitar US\$4 triliun per tahun di negara-negara berkembang. Situs resmi yang menjelaskan Sevilla Commitment juga menegaskan bahwa kerangka pembiayaan pembangunan terbaru dimaksudkan untuk menutup kesenjangan tahunan sebesar itu. Sementara itu, dalam peluncuran Financing for Sustainable Development Report 2026, PBB menyoroti bahwa bantuan pembangunan resmi turun tajam; pada 2025 ada 25 negara yang mengurangi ODA, menghasilkan penurunan keseluruhan 23 persen dari 2024 ke 2025. Jika pembangunan global menuntut investasi besar tetapi arsitektur pembiayaannya justru makin sempit dan mahal, maka seruan keadilan global tidak dapat dipisahkan dari reformasi keuangan internasional. ([Financing for Sustainable Development](#))

6. Mengapa Ketidakadilan Merusak Kemanusiaan dan Pertumbuhan Itu Sendiri?

Sering kali keadilan diperlakukan seolah-olah bertentangan dengan efisiensi. Pandangan ini terlalu sederhana. Ketidakadilan yang terlalu dalam

justeru merusak efisiensi ekonomi itu sendiri. Pertama, ketimpangan mempersempit permintaan efektif jangka panjang karena terlalu banyak pendapatan dan kekayaan terkonsentrasi pada kelompok yang propensi konsumsinya lebih rendah. Kedua, ketimpangan membatasi akumulasi human capital karena keluarga miskin tidak mampu berinvestasi cukup pada gizi, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas digital. Ketiga, ketimpangan meningkatkan instabilitas politik dan biaya sosial, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian bagi investasi. Maka, ekonomi yang lebih adil bukan musuh pertumbuhan; dalam jangka panjang justru dapat menjadi prasyarat pertumbuhan yang lebih stabil dan berkualitas.

World Bank secara eksplisit menyatakan bahwa ketimpangan tinggi dapat mencerminkan kurangnya kesempatan bagi mobilitas sosial-ekonomi dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan inklusif serta pengurangan kemiskinan. UN World Social Report 2025 juga menyoroti bahwa economic insecurity, ketimpangan, menurunnya kepercayaan, dan fragmentasi sosial sedang mengancam stabilitas komunitas di seluruh dunia. Artinya, masyarakat yang terlalu timpang bukan hanya kurang adil, tetapi juga kurang kohesif dan kurang tangguh. ([World Bank](#))

Ketidakadilan juga menghancurkan rasa martabat. Orang yang terus-menerus hidup dalam ketidakpastian kerja, tanpa perlindungan sosial, tanpa akses layanan dasar, dan tanpa peluang mobilitas akan sulit mempercayai bahwa sistem ekonomi bekerja untuk mereka. Dalam situasi demikian, demokrasi dapat melemah, populisme mudah tumbuh, dan solidaritas publik terkikis. UNDP mengingatkan bahwa bila perlambatan pembangunan manusia menjadi normal baru, dunia bisa menjadi lebih terbelah dan lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dan ekologis. Pernyataan ini penting: masalah distribusi bukan hanya soal belas kasih, tetapi juga soal masa depan tatanan sosial-politik. ([UNDP](#))

7. Mencari Keseimbangan: Agenda Ekonomi untuk Kemanusiaan

7.1 Menumbuhkan Ekonomi, tetapi Menata Distribusinya

Agenda pertama adalah mempertahankan pertumbuhan, namun membuatnya lebih inklusif. Ini berarti pergeseran dari obsesi pada output agregat menuju perhatian yang lebih besar pada struktur pertumbuhan. Pertumbuhan yang didorong sektor padat karya produktif, manufaktur bernilai tambah, layanan modern, agribisnis yang efisien, dan infrastruktur sosial akan lebih mungkin menghasilkan manfaat luas daripada pertumbuhan yang semata-mata ditopang konsentrasi aset atau ledakan harga komoditas. World Bank menekankan bahwa perbaikan labor incomes melalui penciptaan pekerjaan yang lebih baik, investasi pada pendidikan, infrastruktur, dan layanan dasar akan sangat penting untuk mempercepat shared prosperity. ([World Bank](#))

Di tingkat kebijakan, ini menuntut industrial policy yang cerdas, bukan proteksionisme buta. IMF mengakui bahwa industrial policy dapat memiliki peran, tetapi harus mempertimbangkan trade-off, opportunity cost, tata kelola, dan risiko rente. Karena itu, ekonomi untuk kemanusiaan bukanlah ekonomi yang anti-negara atau anti-pasar, melainkan ekonomi yang menggunakan negara secara strategis untuk memperbaiki kegagalan pasar dan memperluas kesempatan hidup, sambil tetap menjaga disiplin, transparansi, dan akuntabilitas. ([IMF](#))

7.2 Menjadikan Pekerjaan Layak sebagai Jantung Pembangunan

Agenda kedua adalah menjadikan kerja layak sebagai indikator inti keberhasilan ekonomi. Bila pekerjaan adalah jalur paling andal keluar dari kemiskinan, maka kualitas pekerjaan harus menjadi fokus utama kebijakan. ILO dan World Bank sama-sama menekankan pentingnya jobs sebagai inti pembangunan. Ini berarti investasi pada keterampilan, pendidikan, kesehatan, konektivitas digital, transisi dari informalitas ke formalitas, serta penciptaan ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah. ([WBG Institute](#))

Bagi generasi muda, tantangannya lebih mendesak. Dengan 1,2 miliar pemuda memasuki usia kerja di negara berkembang sepanjang 2025–2035,

dunia membutuhkan strategi besar-besaran untuk penyerapan tenaga kerja produktif. Bila tidak, ketidaksetaraan antargenerasi akan membesar. Di era AI dan otomatisasi, strategi ini juga harus diarahkan bukan hanya untuk melindungi pekerjaan lama, tetapi untuk membangun kapabilitas baru agar teknologi menjadi pelengkap manusia, bukan pengganti yang memperluas eksklusi. UNDP menekankan bahwa pilihan kebijakan akan menentukan apakah AI memperluas peluang atau memperdalam kesenjangan. ([WBG Institute](#))

7.3 Memperluas Perlindungan Sosial sebagai Infrastruktur Kemanusiaan

Agenda ketiga adalah memperlakukan perlindungan sosial bukan sebagai beban anggaran, tetapi sebagai infrastruktur kemanusiaan. Data global menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk dunia kini menikmati setidaknya satu manfaat perlindungan sosial, tetapi 3,8 miliar orang masih tak terlindungi sama sekali. Dalam negara berpendapatan rendah, cakupannya masih sangat minim. Maka, perlindungan sosial dasar—jaminan kesehatan, dukungan anak, pensiun dasar, perlindungan pengangguran, bantuan saat guncangan—harus dipandang sebagai investasi dalam resiliensi sosial dan produktivitas, bukan sekadar konsumsi fiskal. ([UNSD](#))

Hubungan perlindungan sosial dan iklim juga semakin penting. ILO menegaskan bahwa universal social protection memiliki peran penting dalam aksi iklim dan just transition, karena membantu orang menghadapi shock, mencegah jatuh ke kemiskinan, dan membangun kapasitas adaptasi. Dengan kata lain, transisi hijau yang adil memerlukan jaring pengaman yang kuat. Tanpa itu, kebijakan iklim mudah kehilangan dukungan publik, terutama di negara miskin dan komunitas rentan. ([International Labour Organization](#))

7.4 Menjamin Pangan dan Gizi sebagai Hak, Bukan Sekadar Komoditas

Agenda keempat adalah menempatkan pangan sehat sebagai bagian dari keadilan global. Dunia tidak bisa disebut makmur bila ratusan juta orang masih lapar dan jutaan keluarga tidak mampu membeli diet sehat.

Kenaikan biaya diet sehat global dan kelaparan yang masih menimpa 673 juta orang menunjukkan bahwa sistem pangan internasional belum memenuhi fungsi kemanusiaannya. Karena itu, kebijakan pangan harus mencakup produktivitas, distribusi, stabilisasi harga, perlindungan petani kecil, infrastruktur logistik, serta intervensi gizi yang tepat sasaran.

([FAOHome](#))

Dalam konteks global, isu pangan juga terkait erat dengan perdagangan, konflik, perubahan iklim, dan pembiayaan. Negara-negara miskin yang menjadi importir pangan bersih paling rentan terhadap gejolak harga. Maka, keadilan pangan menuntut solidaritas internasional yang lebih nyata, termasuk reformasi perdagangan pertanian dan pembiayaan ketahanan pangan.

7.5 Mereformasi Arsitektur Keuangan Global

Agenda kelima adalah reformasi pembiayaan pembangunan. Tidak masuk akal menuntut negara berkembang mempercepat pembangunan manusia, transisi energi, dan penciptaan kerja, sementara biaya utang tinggi, ODA menurun, dan ruang fiskal makin sempit. Selisih pembayaran utang bersih sebesar US\$741 miliar dan kebutuhan US\$4 triliun per tahun untuk pembiayaan SDGs memperlihatkan bahwa persoalan ini bersifat struktural, bukan sementara. Reformasi diperlukan pada restrukturisasi utang, pembiayaan konsesional, peran bank pembangunan multilateral, perpajakan internasional, dan pencegahan illicit financial flows. ([World Bank](#))

Ekonomi untuk kemanusiaan berarti sistem keuangan global tidak boleh hanya efisien bagi kreditor, tetapi juga harus adil bagi pembangunan manusia. Jika terlalu banyak sumber daya mengalir keluar dalam bentuk

pembayaran bunga dan pokok ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, maka ada kegagalan moral dan kelembagaan dalam tata kelola global.

7.6 Menyatukan Keadilan Sosial dan Keberlanjutan

Agenda keenam adalah menyatukan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Keduanya terlalu lama dipisahkan dalam debat kebijakan. Di satu pihak, ada argumen pertumbuhan yang menganggap batas ekologis sebagai gangguan. Di pihak lain, ada narasi lingkungan yang kadang gagal mengakui urgensi pekerjaan dan pembangunan di negara miskin.

Keseimbangan yang dibutuhkan adalah pertumbuhan hijau yang realistis, transisi energi yang adil, dan investasi besar pada adaptasi iklim, infrastruktur tangguh, transportasi publik, energi terbarukan, dan perlindungan ekosistem, sambil memastikan bahwa beban transisi tidak ditimpakan pada mereka yang paling miskin. ([World Bank](#))

Fakta bahwa 887 juta orang miskin multidimensi tinggal di wilayah yang terpapar setidaknya satu hazard iklim menunjukkan bahwa kebijakan antipoverty dan climate policy harus berjalan bersama. Demikian pula, fakta bahwa 10 persen pengemisi teratas menyumbang hampir setengah emisi global memperlihatkan perlunya prinsip tanggung jawab yang berbeda tetapi adil. ([Human Development Reports](#))

7.7 Menata Teknologi dan AI untuk Manusia

Agenda ketujuh adalah memastikan bahwa teknologi, terutama AI, memperkuat kapabilitas manusia. UNDP 2025 menunjukkan bahwa banyak orang masih berharap AI menciptakan peluang baru, tetapi laporan yang sama menegaskan bahwa tanpa pilihan kebijakan yang tepat AI dapat memperdalam ketimpangan. Karena itu, ekonomi untuk kemanusiaan menuntut akses listrik, internet, pendidikan digital, tata kelola data, perlindungan privasi, dan kebijakan persaingan yang mencegah konsentrasi teknologi hanya di segelintir negara atau perusahaan. Teknologi harus diarahkan untuk memperluas pendidikan, kesehatan,

produktivitas, dan kerja sama manusia, bukan semata mempercepat akumulasi keuntungan.

8. Implikasi Normatif dan Strategis

Bila seluruh pembahasan ini diringkas, maka keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan global memerlukan pergeseran paradigma dari "growth first, distribution later" menuju "inclusive and sustainable growth by design." Keadilan tidak boleh dianggap sebagai koreksi belakangan setelah pertumbuhan terjadi. Ia harus menjadi bagian dari desain sejak awal: siapa yang mendapat akses pendidikan, kredit, teknologi, layanan dasar, pekerjaan, jaminan sosial, dan suara dalam kebijakan. Dalam bahasa lain, ekonomi untuk kemanusiaan menghendaki desain institusi yang membuat hasil pertumbuhan lebih luas dan lebih tangguh.

Secara normatif, ini juga berarti bahwa ukuran keberhasilan perlu diperluas. GDP tetap berguna, tetapi tidak cukup. Dunia perlu lebih serius memakai indikator pembangunan manusia, shared prosperity, pekerjaan layak, perlindungan sosial, affordability pangan sehat, ketimpangan pendapatan dan kekayaan, serta resiliensi iklim. Kebijakan publik yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memeriksa indikator-indikator tersebut akan terus berisiko menipu diri sendiri: ekonomi tampak membesar, tetapi manusia tidak sungguh bertambah sejahtera.

Secara strategis, negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan yang cukup untuk menumbuhkan industri, pekerjaan, dan sistem perlindungan sosial, namun pada saat yang sama dunia juga memerlukan kerja sama multilateral yang lebih kuat. Fragmentasi dagang, penurunan ODA, dan tekanan utang justru datang pada saat kebutuhan investasi sosial-ekologis sedang sangat besar. Karena itu, keadilan global bukanlah slogan moral yang abstrak, tetapi syarat praktis agar stabilitas dan kemakmuran dunia tidak runtuh dari dalam. ([IMF](#))

9. Penutup

Makalah ini berangkat dari satu premis sederhana: ekonomi seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya. Dari sana tampak bahwa pertumbuhan tetap merupakan komponen penting pembangunan, karena tanpa pertumbuhan dunia akan kekurangan pekerjaan, ruang fiskal, dan energi transformasi. Akan tetapi, data global mutakhir juga menunjukkan bahwa pertumbuhan yang ada belum cukup inklusif, belum cukup adil, dan belum cukup tahan guncangan. Pertumbuhan global melambat, kemajuan pembangunan manusia tersendat, kemiskinan ekstrem masih besar, kemiskinan multidimensi menjerat 1,1 miliar orang, 3,8 miliar orang tidak terlindungi oleh sistem perlindungan sosial, 673 juta orang masih lapar, dan struktur pembiayaan global justru menekan ruang pembangunan negara-negara yang paling membutuhkan. ([IMF](#))

Karena itu, mencari keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan global bukanlah proyek marginal, melainkan agenda utama abad ke-21. Keseimbangan itu menuntut pertumbuhan yang menciptakan kerja layak, memperluas kapabilitas manusia, menekan konsentrasi kekayaan yang berlebihan, memperkuat perlindungan sosial, menjamin pangan sehat, mereformasi pembiayaan pembangunan, dan mengaitkan keadilan sosial dengan keberlanjutan ekologis. Dunia tidak memerlukan ekonomi yang anti-pertumbuhan. Dunia memerlukan pertumbuhan yang diarahkan, diatur, dan dinilai dari kontribusinya terhadap martabat manusia.

Akhirnya, ekonomi untuk kemanusiaan adalah panggilan intelektual sekaligus moral. Ia menolak fatalisme bahwa ketimpangan dan kerentanan adalah harga yang tak terhindarkan dari modernitas. Ia juga menolak ilusi bahwa pasar yang dibiarkan sendiri akan otomatis menghasilkan dunia yang adil. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik, imajinasi institusional, dan solidaritas global untuk memastikan bahwa kekayaan, inovasi, dan kemajuan teknologi benar-benar berubah menjadi kehidupan

yang lebih baik bagi sebanyak mungkin manusia. Itulah esensi sejati dari kemakmuran. ([World Bank](#))

Glosarium

Capability approach

Pendekatan yang menilai kesejahteraan berdasarkan kemampuan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga, bukan sekadar berdasarkan pendapatan.

Extreme poverty

Kemiskinan pada tingkat yang sangat rendah menurut garis kemiskinan internasional; pada pembaruan terbaru SDG, digunakan ambang US\$3,00 per hari PPP 2021.

Global Prosperity Gap

Ukuran World Bank untuk melihat seberapa jauh masyarakat, terutama kelompok terbawah, dari tingkat kemakmuran yang layak.

Human Development Index (HDI)

Indeks pembangunan manusia yang menggabungkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Jobs gap

Ukuran kekurangan kesempatan kerja yang lebih luas daripada pengangguran terbuka, karena mencakup mereka yang ingin bekerja tetapi sementara tidak tersedia atau putus asa mencari kerja.

Multidimensional poverty

Kemiskinan yang diukur bukan hanya dari pendapatan, tetapi juga dari deprivasi pada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup dasar.

Shared prosperity

Konsep pertumbuhan yang menekankan kenaikan pendapatan atau konsumsi kelompok 40 persen terbawah.

Social protection

Sistem perlindungan terhadap risiko hidup seperti sakit, pengangguran, kecacatan, usia tua, bencana, atau kemiskinan.

Just transition

Transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dengan tetap melindungi pekerja, komunitas, dan kelompok rentan agar tidak menjadi korban perubahan tersebut.

Working poverty

Keadaan ketika seseorang sudah bekerja, tetapi pendapatannya tetap berada di bawah garis kemiskinan tertentu.

Referensi (APA 7)

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025: Addressing high food price inflation for food security and nutrition*. FAO. ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *Hunger Map 2025*. FAO. ([FAOHome](#))

International Labour Organization. (2024). *World Social Protection Report 2024–26: Universal social protection for climate action and a just transition*. ILO. ([International Labour Organization](#))

International Labour Organization. (2025). *World Employment and Social Outlook: Trends 2025*. ILO. ([International Labour Organization](#))

International Labour Organization. (2026). *Employment and Social Trends 2026: Executive summary*. ILO Research Repository. ([Research Repository](#))

International Monetary Fund. (2025). *World Economic Outlook, October 2025: Global economy in flux, prospects remain dim*. IMF. ([IMF](#))

Mazzucato, M. (2018). *The value of everything: Making and taking in the global economy*. PublicAffairs.

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.

Polanyi, K. (1944). *The great transformation*. Farrar & Rinehart.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist*. Chelsea Green.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.

Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality*. W. W. Norton.

United Nations. (2025). *The Sustainable Development Goals Report 2025*. United Nations Statistics Division. ([UNSD](#))

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2025). *World Social Report 2025: A new policy consensus to accelerate social progress*. UN DESA. ([UN DESA](#))

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2026). *Financing for Sustainable Development Report 2026 and related official materials on the Sevilla Commitment*. UN DESA. ([Financing for Sustainable Development](#))

United Nations Development Programme. (2025). *Human Development Report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of AI*. UNDP. ([Human Development Reports](#))

United Nations Development Programme, & Oxford Poverty and Human Development Initiative. (2025). *Global Multidimensional Poverty Index 2025: Overlapping hardships—Poverty and climate hazards*. UNDP & OPHI. ([Human Development Reports](#))

World Bank. (2024). *Poverty, Prosperity, and Planet: Pathways out of the polycrisis*. World Bank. ([World Bank](#))

World Bank. (2025). *International Debt Report 2025*. World Bank. ([World Bank](#))

World Bank Group. (2026). *The Global Jobs Challenge*. World Bank Institute. ([WBG Institute](#))

World Inequality Lab. (2022). *World Inequality Report 2022*. WID.world.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 12 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d6386a-621c-83a0-bebe-7b2a4b62b7c5>